BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Manajemen Pengelolaan Sekolah Inklusif di SMPN 3 Jombang*, maka kesimpulan dari setiap rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Pengelolaan Sekolah Inklusif di SMPN 3 Jombang

Manajemen pengelolaan sekolah inklusif di SMPN 3 Jombang dilaksanakan secara sistematis dan kolaboratif melalui empat fungsi manajemen menurut Henry Fayol, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

Perencanaan dilakukan melalui asesmen awal terhadap siswa ABK dengan melibatkan guru BK, wali kelas, orang tua, serta tenaga kesehatan dari SLB dan puskesmas. Hasil asesmen menjadi dasar penyusunan *rapor khusus*, Program Layanan Individual (PLI), serta strategi pembelajaran yang ramah dan adaptif terhadap kebutuhan siswa.

Pengorganisasian dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, guru BK, wali kelas, dan guru mata pelajaran. Kepala sekolah sebagai koordinator utama menugaskan guru BK sebagai pendamping khusus, sedangkan wali kelas bertugas mengelola kelas inklusif secara fleksibel.

Pengarahan diberikan secara berkelanjutan melalui rapat, bimbingan, dan forum diskusi. Kepala sekolah memberikan motivasi dan arahan teknis kepada guru agar memahami pendekatan pembelajaran inklusif. Guru BK juga memberikan pengarahan internal kepada guru lain dalam menangani siswa ABK.

Pengendalian dilakukan melalui monitoring dan evaluasi berkala terhadap perkembangan siswa. Kepala sekolah, guru BK, dan wali kelas memantau kehadiran, capaian belajar, serta perubahan perilaku siswa ABK. Evaluasi dilakukan secara reflektif dan korektif agar pembelajaran tetap sesuai rencana

2. Tantangan dalam Pengelolaan Sekolah Inklusif di SMPN 3 Jombang

Terdapat empat tantangan utama dalam pengelolaan sekolah inklusif di SMPN 3 Jombang:

Terbatasnya sumber daya manusia yang memahami pendidikan inklusif, karena belum semua guru mendapatkan pelatihan khusus mengenai siswa ABK.

Kurangnya sarana dan prasarana, seperti alat bantu belajar, aksesibilitas ruang kelas, dan fasilitas pendukung lainnya bagi siswa dengan hambatan fisik atau sensori.

Kesulitan dalam penyesuaian kurikulum dan penilaian, karena belum tersedia panduan teknis yang memadai untuk menyederhanakan indikator capaian pembelajaran.

Rendahnya kesadaran lingkungan, baik dari siswa reguler maupun orang tua, terhadap pentingnya penerimaan terhadap siswa ABK, yang menimbulkan tantangan dalam menciptakan suasana inklusif.

Dengan demikian, pengelolaan sekolah inklusif di SMPN 3 Jombang memerlukan dukungan menyeluruh dari seluruh pihak sekolah, keluarga, dan pemangku kebijakan agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang adil, adaptif, dan ramah terhadap keberagaman.

B. Saran

1. Untuk Kepala Sekolah

   Diharapkan terus memperkuat koordinasi dalam manajemen inklusif, mengadakan pelatihan berkelanjutan, dan membangun kerja sama lintas sektor (SLB, puskesmas, dinas pendidikan) untuk meningkatkan kualitas layanan bagi siswa ABK.

2. Untuk Guru BK

   Diharapkan menjadi penghubung yang aktif antara sekolah, orang tua, dan layanan eksternal. Selain itu, guru BK perlu terus mengembangkan kompetensinya sebagai guru pendamping khusus melalui pelatihan dan kolaborasi dengan lembaga profesional.

3. Untuk Guru dan Wali Kelas

   Diharapkan lebih proaktif dalam meningkatkan kompetensi melalui

pelatihan, diskusi internal, dan refleksi praktik pengajaran inklusif agar mampu merancang pembelajaran yang fleksibel dan adaptif sesuai kebutuhan siswa ABK.

4. Untuk Orang Tua dan Masyarakat

   Perlu terus diberikan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pendidikan inklusif agar tercipta penerimaan sosial terhadap siswa berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah dan sekitar.

5. Untuk Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan

   Diharapkan menyediakan pelatihan intensif dan berkala mengenai pendidikan inklusif, memperluas dukungan sarana prasarana, serta menyusun kebijakan teknis penyesuaian kurikulum dan penilaian bagi siswa ABK.

6. Untuk Peneliti Selanjutnya

   Disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan cakupan lebih luas pada jenjang sekolah lain atau dengan pendekatan kuantitatif guna mengevaluasi efektivitas pengelolaan sekolah inklusif secara menyeluruh dan terukur.